

Laju Perubahan Penutupan Lahan dan Faktor-Faktor Yang Mendorong Perambahan Kawasan Hutan Bukit Balai Wilayah Pengelolaan UPTD KPH Wilayah XI Kikim-Pasemah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Dedi Harianto^{a*}, Yansen^b, Hery Suhartoyo^b, M. Faiz Barchia^a, & Guswani Anwar^b

^a Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, Indonesia

^bJurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, Indonesia

*Corresponding author: dharianto54@yahoo.com

Submitted: 2022-10-18. Revised: 2022-10-23. Accepted: 2022-10-30

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian adalah untuk mengetahui laju perubahan tutupan lahan dan klasifikasi tutupan di Kawasan Hutan Bukit Balai periode tahun 2013-2018, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perambahan di Kawasan Hutan Bukit Balai. Penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara dan studi pustaka. Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling*. Data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan laju perubahan tutupan lahan kering campur semak mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 748,72 ha, hal ini terjadi karena adanya aktifitas perambahan hutan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Laju perubahan tutupan lahan yang mengalami peningkatan di Kawasan Hutan Bukit Balai adalah pertanian lahan kering campur semak, sedangkan tutupan lahan yang mengalami penurunan luas terbesar adalah hutan lahan kering sekunder. Berdasarkan kelompok fungsi kawasan perubahan terluas terjadi pada kawasan hutan lindung. Faktor yang mendorong perambahan yaitu: faktor sosial ekonomi, laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan, rendahnya pengakuan masyarakat terhadap wilayah Kawasan Hutan Bukit Balai, faktor aksesibilitas, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dibidang kehutanan.

Kata kunci: Kawasan hutan, tutupan lahan, perambahan, sosial ekonomi

PENDAHULUAN

Hutan adalah sebuah ekosistem yang menyediakan begitu banyak manfaat bagi kehidupan. Rautner *et al* (2013) menyatakan bahwa manusia bergantung pada hutan untuk bertahan hidup. Fakta bahwa hutan adalah penghasil oksigen dan pengatur tata air merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam membuat pernyataan tersebut. Selain itu, hutan juga mempunyai peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan kesuburan tanah, mencegah bencana alam, serta menghasilkan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk itulah keberadaan dan kualitas hutan menjadi sangat penting untuk dipertahankan.

Kenyataannya, keberadaan dan kualitas hutan di Indonesia sedang terancam oleh deforestasi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020), deforestasi telah menyebabkan Indonesia kehilangan 462.400 hektar areal berhutan, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Analisa perubahan tutupan lahan menggunakan GIS dapat dilakukan untuk membantu memetakan penyebab deforestasi di suatu kawasan hutan. Pemanfaatan GIS ini akan memberikan data yang lengkap, cepat, akurat, dan relatif murah (Arfan, 2008). Analisa perubahan tutupan lahan akan menyediakan data spesifik terkait pola perubahan tutupan dan penggunaan lahan. Berdasarkan

data ini, pemerintah dapat menentukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi deforestasi secara tepat. Oleh karena itu, analisa perubahan tutupan lahan menjadi penting untuk dilakukan.

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkenaan dengan analisa perubahan lahan. Sinaga dan Darmawan (2014) melakukan analisa perubahan tutupan lahan pada Resort Pugung Tampak-Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan berhasil mengidentifikasi bahwa perluasan lahan pertanian menjadi pemicu utama deforestasi di kawasan tersebut. Bode dkk. (2015) juga melakukan analisa perubahan tutupan lahan di Taman Hutan Raya Gunung Tumpa yang mengungkap bahwa terdapat 5,90% tutupan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian. Sayangnya, penelitian-penelitian ini tidak melakukan analisa terhadap faktor-faktor pendorong perambahan dan tidak pula mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Hutan Bukit Balai yang terletak di wilayah administrasi Kabupaten Empat Lawang. Kawasan ini memiliki tiga kelompok hutan berdasarkan fungsinya, yaitu: hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi. Ada beberapa pertimbangan yang digunakan dalam penentuan lokasi ini. Pertama, Kawasan Hutan Bukit Balai dapat dikategorikan sebagai ekosistem hutan dataran rendah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kedua,

secara hidrologi, kawasan hutan ini terletak di bagian hulu DAS Musi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai DAS Prioritas I. Kawasan ini memiliki nilai yang sangat strategis sebagai pelindung bagi wilayah hilir DAS Musi yang meliputi hampir tiga wilayah provinsi. Ketiga, areal berhutan yang tersisa di kawasan ini hanya sebesar 30,88% akibat aktifitas *illegal* seperti perambahan dan pembalakan liar. Sisa areal berhutan ini harus dilindungi dan dipertahankan keberadaannya.

MATERI DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan dari Bulan Februari sampai dengan Oktober 2019 di Kawasan Hutan Bukit Balai Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa kawasan hutan tersebut sudah terjadi perambahan dalam waktu yang cukup lama, dikarenakan lokasi Kawasan Hutan Bukit Balai berdekatan dengan pemukiman masyarakat serta kemungkinan adanya dampak langsung dari pembangunan aksesibilitas yang berdekatan dengan kawasan hutan tersebut.

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat perambah Kawasan Hutan Bukit Balai dengan jumlah responden sebanyak 96 orang. Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling*, karena populasi yang diteliti *infinite* (populasi yang jumlah dan identitas anggota populasi tidak diketahui). Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen dari instansi yang terkait dengan penelitian ini serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara dengan alat bantu kuesioner, studi pustaka dan dokumentasi.

Analisis Data

Tabel 1. Data luas wilayah per fungsi kawasan

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	(%)
1	Hutan Lindung	14.604,23	65.22
2	Hutan Produksi Terbatas	4,555,02	20.34
3	Hutan Produksi	3.233,26	14.44
Jumlah		22.392,51	100

Sumber: MENLHK (2016)

Karakteristik Sosial Ekonomi Perambah

Karakteristik sosial ekonomi perambah di Kawasan Hutan Bukit Balai merupakan hasil analisa dan wawancara yang telah dilaksanakan selama penelitian. Penjabaran karakteristik sosial ekonomi perambah adalah sebagai berikut:

Umur perambah di Kawasan Hutan Bukit Balai didominasi pada umur usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebanyak 98,96%. Utama (2016) menyatakan pada umumnya masyarakat yang melakukan perambahan merupakan masyarakat dalam kategori usia produktif, mengingat dalam melakukan kegiatan pembukaan lahan sangat membutuhkan kekuatan fisik manusia.

Laju perubahan tutupan lahan menggunakan analisis spasial dengan cara membandingkan peta tutupan lahan tahun 2013 dengan peta tutupan lahan tahun 2018. Hal ini dilakukan untuk mengetahui laju perubahan tutupan lahan yang terjadi antara tahun 2013-2018. Perbandingan peta ini dilakukan dengan cara mengoverlay peta-peta tersebut pada program ArcGIS sehingga akan terlihat laju perubahan tutupan lahan pada Kawasan Hutan Bukit Balai di wilayah pengelolaan UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah. Perubahan tutupan lahan kurun waktu 2013-2018 dianalisis menggunakan rumus:

$$V = \left(\frac{N2 - N1}{N1} \times 100\% \right)$$

V = Laju perubahan (%)

N1 = Luas tutupan tahun pertama (ha)

N2 = Luas tutupan lahan tahun kedua (ha)

Faktor-faktor yang mendorong perambahan, menggunakan analisis deskriptif kualitatif, merupakan metode berupa uraian-uraian kalimat yang tidak menggunakan perhitungan angka-angka. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian mudah dipahami. Data-data di lapangan direduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendorong perambahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis, Kawasan Hutan Bukit Balai berada diantara koordinat 3°29'40" - 3°37'28" Lintang Selatan dan 102°57'47" - 103°1'6.783" Bujur Timur. Kawasan hutan ini secara keseluruhan berada di wilayah administrasi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan

Luas Kawasan Hutan Bukit Balai adalah 22.392,51 hektar yang terdiri dari tiga kelompok fungsi hutan, yaitu: hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi. Sebagian besar luas Kawasan Hutan Bukit Balai merupakan kelompok fungsi hutan lindung sebagaimana disajikan pada Tabel

Mayoritas masyarakat perambah Kawasan Hutan Bukit Balai dapat dikategorikan berpendidikan rendah (tidak tamat SD – SMP) dengan persentase sebesar 68,75%. Namun terdapat 31,25% yang berpendidikan tinggi (SMA) dan tetap memutuskan untuk merambah kawasan hutan. Ada beberapa hasil penelitian yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Oktarina dkk. (2009) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan yang didapat. Mulyani (2000) menyatakan bahwa ada korelasi negatif antara tingkat pendidikan formal dengan usaha pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan Wahyuni dan Mamonto (2012) menyatakan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam lebih

berorientasi pada peningkatan sosial ekonomi. Artinya bahwa tingkat pendidikan tidak semata-merta berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk merambah kawasan hutan.

Jumlah anggota keluarga perambah di Kawasan Hutan Bukit Balai tersebar pada keluarga sedang (68,75%), pada keluarga sedikit (28,125%) dan pada keluarga besar (3,125%). Klasifikasi ini berdasarkan pendapat Purwanti (2007) yang mengklasifikasikan jumlah anggota keluarga dikelompokkan atas 3 kategori, yaitu kecil apabila jumlah keluarga 2-3 orang, sedang jika berjumlah 4-5 orang dan besar bila jumlahnya lebih dari 5 orang.

Perambah Kawasan Hutan Bukit Balai mayoritas adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yaitu sebanyak 73,96%. Sementara itu terdapat juga masyarakat perambah yang berasal bukan sekitar kawasan yaitu sebanyak 26,04%. Hal ini sejalan dengan pendapat Diantoro (2011) bahwa pelaku perambahan hutan pada umumnya adalah masyarakat disekitar kawasan hutan yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang terbatas sehingga membutuhkan lahan untuk bercocok tanam untuk menopang kehidupannya

Perambah memperoleh lahan rambahannya dengan cara membuka sendiri lahan rambahan (53,125%), kemudian 37,5% diperoleh dari membeli, dan 9,375% diperoleh dari warisan. Banyaknya masyarakat yang membuka lahan sendiri menjadi indikasi bahwa tidak adanya pencegahan perambahan di areal kawasan hutan, baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat sekitar Kawasan Hutan Bukit Balai. Banyaknya masyarakat yang membuka lahan sendiri menjadi indikasi bahwa tidak adanya pencegahan perambahan di areal kawasan hutan,

baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat sekitar Kawasan Hutan Bukit Balai.

Pekerjaan utama yang dilakukan perambah adalah mengerjakan lahan/kebun yang diusahakan di dalam kawasan hutan maupun yang ada di luar kawasan hutan. Pekerjaan sampingan yang dimiliki terdiri dari buruh harian, buruh tani, kenek bangunan, ojek, dan tidak memiliki pekerjaan sampingan.

Luas lahan garapan yang dikelola oleh masyarakat perambah di dalam Kawasan Hutan Bukit Balai termasuk dalam kategori sedang, yaitu seluas 1 sampai 2 Ha per kepala keluarga yaitu sebanyak 94,79 %. Dari data tersebut diketahui bahwa mereka membuka lahan di kawasan hutan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Penghasilan setiap petani perambah berbeda-beda pendapatannya. Pendapatan petani terbanyak dikisaran Rp. 10.000.000,- sampai Rp.50.000.000,-/tahun yaitu sebanyak 80,21%. Perbedaan pendapatan ini disebabkan adanya perbedaan luas lahan yang dikelola, kepemilikan lahan di luar kawasan, pekerjaan sampingan yang dilakukan dan jenis tanaman yang dibudidayakan. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jenis tanaman petani didominasi oleh tanaman kopi, karet dan durian.

Laju Perubahan Tutupan lahan

Tutupan lahan di Kawasan Hutan Bukit Balai tahun 2013 merupakan kondisi awal yang akan dijadikan tolak ukur dalam analisa perubahan tutupan lahan, selanjutnya dibandingkan dengan tutupan lahan tahun 2018. Persebaran masing-masing tipe tutupan lahan di Kawasan Hutan Bukit Balai tahun 2013 dan tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Laju perubahan tutupan lahan Kawasan Hutan Bukit Balai periode tahun 2013-2018

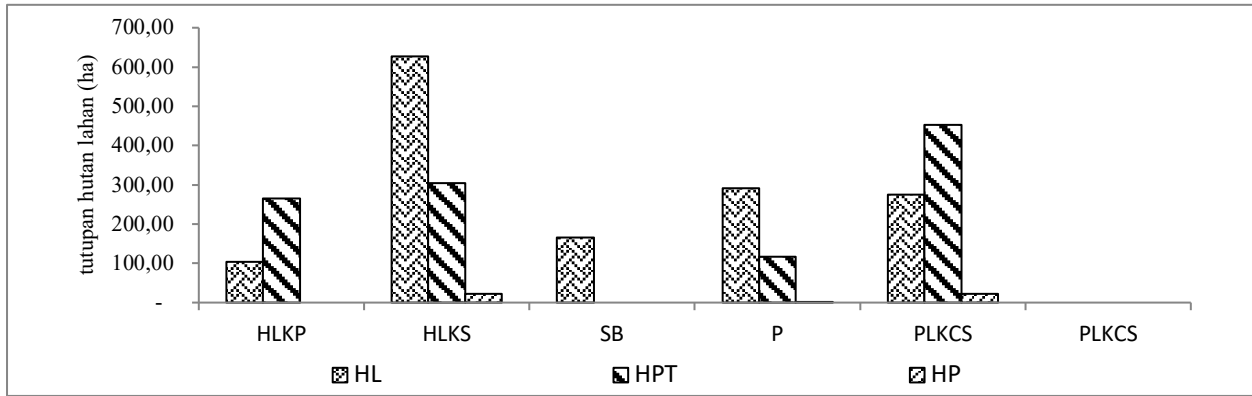
No	Tutupan Lahan	Tahun				Perubahan Tutupan Lahan		
		2013		2018		Luas	Laju (%)/ 5 Tahun	Laju (%)/ Tahun
		Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)			
1	Hutan Lahan Kering Primer	3.812,03	17,02	3.443,91	15,38	(368,12)	(1,64)	(0,33)
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	5.067,24	22,63	4.113,28	18,37	(953,96)	(4,26)	(0,85)
3	Semak Belukar	97,47	0,44	262,54	1,17	165,08	0,74	0,15
4	Perkebunan	-	-	408,29	1,82	408,29	1,82	0,36
5	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	12.125,01	54,15	12.873,73	57,49	748,72	3,34	0,67
6	Pertanian Lahan Kering	1.290,77	5,76	1.290,76	5,76	-	-	-
Jumlah		22.392,51	100	22.392,51	100			

Tutupan Kawasan Hutan Bukit Balai mengalami beberapa perubahan, dimana pada tahun 2013 teridentifikasi lima tipe tutupan lahan, sedangkan pada peta tutupan lahan tahun 2018 adanya penambahan tipe tutupan perkebunan sehingga menjadi enam tipe tutupan. Tutupan lahan di Kawasan Hutan Bukit Balai tahun 2013 didominasi oleh tipe tutupan pertanian lahan kering campur semak (54,15%) diikuti oleh hutan lahan kering sekunder (22,63%) dan hutan lahan kering primer (17,02%). Pada tutupan lahan tahun 2018 tutupan pertanian lahan kering campur semak masih mendominasi dari seluruh tipe tutupan lahan yang ada di Kawasan Hutan Bukit Balai.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui tipe tutupan lahan yang mengalami peningkatan luas wilayah dalam jumlah yang cukup besar adalah pertanian lahan kering campur

semak. Luas tutupan lahan kering campur semak mengalami peningkatan sebesar 3,34 % dibandingkan tahun 2013. Pembukaan lahan baru untuk kegiatan budidaya pertanian merupakan penyebab utama peningkatan luas tipe tutupan lahan ini. Selanjutnya pada kurun waktu tahun 2013-2018, tutupan lahan hutan lahan kering sekunder mengalami penurunan luas wilayah sebesar 953,96 hektar atau 4,26% dari luas tahun 2013. Tipe tutupan hutan lahan kering sekunder sebagian besar berubah menjadi pertanian lahan kering campur semak dan perkebunan.

Gambar 1 disajikan perubahan tutupan lahan per kelompok fungsi di wilayah Kawasan Hutan Bukit Balai, yaitu hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi.



Gambar 1. Perubahan tutupan per fungsi kawasan

Hasil analisa menunjukkan perubahan terbesar terjadi di kawasan hutan lindung pada tipe tutupan hutan lahan kering sekunder yaitu mengalami pengurangan luas sebesar 627,79 hektar dari luas total pada tahun 2013 seluas 3.270,57 hektar. Berkurangnya tipe tutupan ini diikuti dengan adanya penambahan luas tipe tutupan pertanian lahan kering campur semak dan tipe tutupan semak belukar.

Perubahan tutupan lahan yang terjadi di Kawasan Hutan Bukit Balai disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah kegiatan perambahan kawasan hutan dan *illegal logging*. Selain itu adanya lahan yang semula telah dibuka menjadi lahan kebun akhirnya ditinggalkan serta tidak dikelola lagi sehingga menjadi semak belukar.

Faktor yang mendorong perambahan

1. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi tertinggi yang mendorong terjadinya perambahan di Kawasan Hutan Bukit Balai adalah faktor kepemilikan lahan di luar kawasan dan pekerjaan, dimana 69,79% responden menyatakan tidak memiliki lahan di luar kawasan hutan dan 63,54% responden tidak memiliki pekerjaan lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Pasha dan Susanto (2009) yang menyatakan perambahan lebih disebabkan karena masyarakat tidak memiliki lahan/kebun ditanah marga disamping tidak memiliki pekerjaan serta terdesaknya kebutuhan ekonomi.

2. Laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan pertanian

Kabupaten Empat Lawang memiliki luas 2.256,44 KM² atau 225.644 hektar, dimana 33,98% merupakan kawasan hutan yaitu seluas 76.690,45 hektar. Sementara lahan yang telah dibebani izin untuk perusahaan perkebunan seluas 66.922,35 hektar. Dengan asumsi lahan yang dibebani izin telah dikuasai oleh perusahaan maka hanya tersisa 82.031,2 hektar lahan di APL yang dapat dikelola oleh masyarakat, semetara jumlah kepala keluarga di Kabupaten Empat Lawang berjumlah 109.796 KK (BPS, 2017) maka diperoleh hasil rata-rata lahan yang dapat dikelola masyarakat Kabupaten Empat Lawang yaitu 0,75 hektar per KK. Angka ini belum memperhitungkan tutupan lahan yang tidak dapat diolah menjadi lahan pertanian/perkebunan seperti sungai dan danau, serta masih mengabaikan penggunaan lahan lainnya.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan terlalu banyaknya izin yang berkenaan dengan penggunaan lahan pada akhirnya akan mempersempit masyarakat untuk dapat mengelola lahan di luar kawasan hutan. Yusri dkk. (2011) menyatakan bahwa penguasaan lahan yang sempit di luar

kawasan berimplikasi pada pendapatan yang rendah dan menyebabkan masyarakat menggarap di dalam kawasan hutan untuk menambah penghasilan. Secara tidak langsung dengan adanya perusahaan perkebunan di Kabupaten Empat Lawang turut mempengaruhi kegiatan perambahan Kawasan Hutan Bukit Balai. Sebagaimana Hidayah dkk. (2016) menyatakan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo telah menyebabkan perubahan lanskap ekologi dimana hutan menjadi terdegradasi secara masif.

3. Rendahnya pengakuan masyarakat terhadap wilayah Kawasan Hutan Bukit Balai

Rendahnya pengakuan masyarakat terhadap Kawasan Hutan Bukit Balai lebih disebabkan karena ketidaktahuan batas wilayah kawasan hutan. Berdasarkan wawancara, sebanyak 94,79% responden menyatakan belum pernah melihat tanda batas kawasan hutan baik berupa patok maupun tanda lain yang menginformasikan batas-batas kawasan.

Pemasangan tanda batas kawasan hutan sangatlah penting dilakukan sebagai bentuk penegasan batas wilayah sebagaimana Talitha dkk. (2015) menyatakan pemisahan batas wilayah itu menjadi tegas bila ada pembatas yang jelas.

Selain tanda batas kawasan, rendahnya pengakuan masyarakat terhadap Kawasan Hutan Bukit Balai juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak pengelola. Hasil wawancara menunjukkan 66,7% responden menyatakan belum pernah mendapat penyuluhan terkait dengan kehutanan. Kurangnya sosialisasi di Kawasan Hutan Bukit Balai salah satu penyebabnya adalah keterbatasan jumlah personil penyuluh kehutanan yang dimiliki UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah, yang saat ini hanya tersedia lima orang personil penyuluh kehutanan.

4. Faktor Aksesibilitas

Dengan adanya pembangunan jalan penghubung antara Kelurahan Talang Gunung dengan Desa Tanjung Ning turut mempermudah masyarakat masuk ke dalam wilayah Kawasan Hutan Bukit Balai, sebagaimana Priambudi dan Pigawati (2014) menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan adalah aksesibilitas yang pada akhirnya akan mempengaruhi jarak dan waktu tempuh menuju suatu lokasi.

5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dibidang kehutanan

Berbagai faktor penyebab lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di Kawasan Hutan Bukit Balai, diantaranya adalah keterbatasan personil Polhut yang ditugaskan di UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah yang terdiri dari 3 orang personil Polhut, sementara kawasan hutan yang harus diawasi begitu luas yaitu seluas ± 113.889 hektar. Hal ini sejalan dengan pernyataan Subarna (2011) yang menyebutkan salah satu faktor kurangnya pengawasan dikarenakan jumlah tenaga pengamanan hutan yang tidak memadai yang akhirnya menyebabkan masyarakat melakukan aktifitas di dalam kawasan seperti *illegal logging* dan perambahan kawasan. Selain terbatasnya personil, juga terkendala dengan kerbatasan dana untuk membiayai kegiatan patroli untuk mengantisipasi ancaman terhadap kawasan hutan yang bersifat pengawasan dan penegakan hukum kehutanan.

Di sisi hukum, lemahnya penegakan hukum kehutanan disebabkan belum adanya pemberian sanksi terhadap kegiatan perambahan yang dilakukan masyarakat di Kawasan Hutan Bukit Balai. Kenyataannya, kegiatan perambahan kawasan hutan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum kehutanan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa setiap orang dilarang merambah kawasan hutan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nugroho (2009) yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup pada umumnya dan kerusakan hutan khususnya, disebabkan Indonesia adalah tergolong negara lunak (*soft state*), artinya posisi negara sangat lemah dalam menindak penyebab-penyebab kerusakan hutan.

KESIMPULAN

Laju perubahan tutupan lahan di Kawasan Hutan Bukit Balai yang mengalami perubahan signifikan terjadi pada tipe tutupan lahan hutan kering sekunder, yaitu mengalami penurunan luas sebesar 953,96 hektar. Faktor pendorong yang paling mendasar terjadinya perambahan yaitu lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang kehutanan serta faktor sosial ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, I. 2008. Akutansi lingkungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Empat Lawang dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang. Empat Lawang.
- Bode, C., F. B. Saroinsong, J. S. Tasirin, & J. A. Rombang. 2015. Analisa perubahan tutupan lahan di Taman Hutan Raya Gunung Tumpa. Jurnal Unsrat. 6(11) : 1-10.
- Diantoro, T. D. 2011. Perambahan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau). Mimbar Hukum. (23(3) : 431-645
- Geist, H. J. & E. F. Lambin. 2002. Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation. Bioscience. 52. : 143-150.
- Hidayah, N., A. H. Dharmawan, & B. Barus. 2016. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit dan Perubahan Sosial Ekologi Pedesaan. Jurnal Sosial Ekologi Pedesaan. 249-256.
- Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2016. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dalam SKMENLHK/SETJEN/PLA.2/6.
- Mulyani, E. S. S. 2000. Hubungan Antara Latar Belakang Pendidikan Formal, Pengetahuan Lingkungan dan Peran Serta Wanita dalam Usaha Pelestarian Lingkungan. Jurnal Ilmu Pendidikan. 7(2) : 162-170.
- Oktarina, H. Fachrudi & M. A. Budisuari. 2009. Hubungan Karakteristik Responden, Keadaan Wilayah, Pengetahuan, Sikap Terhadap HIV/AIDS di Indonesia. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. 12 (4) : 362-369.
- Pasha, R. & A. Susanto. 2009. Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perambah Hutan dengan Pola Penggunaan Lahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jurnal Organisasi dan Manajemen. 5(2) : 82-94.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jakarta.
- Priambudi, B. N, & B. Pigawati. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan dan Sosial Ekonomidi Sekitar Apartemen Mutiara Garden. Jurnal Teknik PWK. 3(4) : 576-584.
- Purwanti, R. 2007. Pendapat Petani Daratan Tinggi Sub DAS Maleno. Studi Kasus Kelurahan Gantarang Kabupaten Gowa. Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan. 4(3) : 257-269.
- Sinaga, R. P. & A. Darmawan. 2014. Perubahan tutupan lahan di Resort Pugung Tampak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Jurnal Sylva Lestari. 2(1) : 77-86.
- Subarna, T. 2011. Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggarap di lahan hutan lindung studi kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat. Jurnal penelitian sosial dan ekonomi kehutanan, 8 (4) : 265-275.
- Talitha, S. A. N., M. Makmur, & Siswidiyanto. 2015. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006 Studi pada Kantor Sekretariat Daerah, Bag. Administrasi Pemerintahan, Subbag. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Administrasi Publik. 1(1): 1-7.
- Utama., F. C. U. 2016. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Perambah dan Perubahan Tutupan Lahan dan Hutan Lindung Bukit Riki Kabupaten Bengkulu Selatan. Tesis. Fakultas Pertanian Program Studi Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Universitas Bengkulu (tidak dipublikasikan).
- Wahyuni, N.I., & R. Mamonto. 2012. Persepsi Masyarakat Terhadap Taman Nasional dan Sumberdaya Hutan: Studi Kasus Blok Aketawaje, Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Info BPK Manado. 2(1) : 1-16.
- Yusri, Basuni, dan B Prasetyo. 2012. Analisis Faktor Penyebab Perambahan Kawasan Taman nasional Gunung Ceremai. Media Konservasi. I(1) : 1-5.
- Zaidan, M. A. 2014. Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis. 1(1): 107-124.